

ANALISIS TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2003-2019

POVERTY LEVEL ANALYSIS IN WONOSOBO DISTRICT IN 2003-2019

¹⁾Abdul Azis, ²⁾Lorentino Togar Laut, ³⁾Rian Destiningsih
(^{1,2,3})Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Kota Magelang, Jawa Tengah, Indonesia
abdulaziz27071997@gmail.com

Abstrak

Permasalahan dalam pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo adalah rata-rata dari persentase masyarakat miskin dari tahun 2003 hingga 2019 lebih besar daripada kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Tujuan studi ini adalah untuk meneliti pengaruh pendidikan, pengeluaran perkapita dan inflasi terhadap persentase kemiskinan di Kabupaten Wonosobo tahun 2003-2019. Penelitian ini menggunakan alat analisa regresi linear berganda dengan statistik data runtut waktu dari tahun 2003 hingga 2019. Berdasarkan hasil, bisa diketahui bahwa secara segmental pendidikan dan pengeluaran perkapita punya pengaruh negatif terhadap persentase kemiskinan, serta inflasi punya dampak positif terhadap persentase kemiskinan di Kabupaten Wonosobo dari tahun 2003- 2019. Apabila dilihat secara simultan, pendidikan, pengeluaran perkapita dan inflasi menunjukkan pengaruh terhadap persentase kemiskinan di Kabupaten Wonosobo dari 2003-2019.

Kata Kunci : kemiskinan, pendidikan, pengeluaran perkapita, inflasi

Abstract

The problem in the regional development of Wonosobo Regency is that the average percentage of the poor from 2003 to 2019 is greater than other districts in Central Java Province. The purpose of this study is to examine the effect of education, per capita expenditure and inflation on the percentage of poverty in Wonosobo Regency in 2003-2019. This study uses multiple linear regression analysis tools with time series data statistics from 2003 to 2019. Based on the results, it can be seen that segmental education and per capita expenditure has a negative effect on the percentage of poverty, and inflation has a positive impact on the percentage of poverty in the district Wonosobo from 2003-2019. When viewed simultaneously, education, per capita expenditure and inflation show an influence on the percentage of poverty in Wonosobo District from 2003-2019.

Keywords : poverty, education, per capita expenditure, inflation

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan elusif untuk dipecahkan hampir di saban daerah di Indonesia, kemiskinan juga menjadi tolok ukur keadaan sosial ekonomi dalam mengevaluasi pembangunan daerah yang dilaksanakan pemerintah. Akibat bertambahnya kemiskinan memunculkan problematika sosial yang sifatnya negatif (Sholihah, 2019:159). Menurut Widjajanti (dalam Putri, 2019:326) Kemiskinan adalah kondisi keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak seperti keterbatasan dalam pendapatan, keterampilan, kondisi kesehatan, penguasaan aset ekonomi, ataupun akses informasi.

Permasalahan dalam pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo adalah rata-rata dari persentase masyarakat miskin dari tahun 2003 hingga 2019 lebih besar daripada kabupaten lain di Provinsi JATENG. Dari tabel 1., dapat diketahui rata-rata persentase kemiskinan Kabupaten Wonosobo dari tahun 2003-2019 menempati peringkat pertama.

Tabel 1. Lima Kabupaten dengan Rata-rata Persentase Kemiskinan Tertinggi di Provinsi JATENG Tahun 2003-2019.

Kabupaten	Rata-rata	Peringkat
Wonosobo	25.18%	1
Kebumen	24.29%	2
Rembang	23.99%	3
Purbalingga	23.79%	4
Brebes	23.31%	5

Sumber : BPS Jawa Tengah, Diolah

Ada beberapa penyebab yang melatarbelakangi kemiskinan tersebut, pertama rendahnya tingkat pendidikan. Dari data BPS Kabupaten Wonosobo (2019),

pendidikan yang dilihat dari angka melek huruf sebesar 95.5 persen pada tahun 2019. Angka tersebut belum mencapai 100 persen yang berarti masih ada penduduk yang masih buta huruf. Menurut Dardiri (dalam Hardinandar, 2019:2) menjelaskan bahwa pendidikan adalah penyelesaian masalah untuk menyiapkan seseorang masuk pasar ketenagakerjaan, dengan pendidikan, kemiskinan dapat ditekan dan berkurang dalam jangka panjang karena dengan tahapan pendidikan yang sistematis dihasilkan tenaga kerja yang punya keterampilan.

Selain pendidikan, pengeluaran perkapita juga punya dampak terhadap kesejahteraan ekonomi penduduk miskin. BPS Kabupaten Wonosobo (2019) mencatat bahwa pengeluaran perkapita penduduk di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2019 adalah sebesar Rp10.871.000,00 per penduduk atau hanya Rp.29.783,56 per hari. Meskipun demikian, setiap kenaikan, setiap nilai yang diminta tidak memenuhi standar hidup yang layak, bahkan untuk mencukupi kebutuhan hidup dasar. Angka pengeluaran menggambarkan tentang pola pengeluaran rumah tangga dan dapat dijadikan ukuran mengevaluasi tingkat kesejahteraan ekonomi rumah tangga (BPS, 2019).

Selain pendidikan dan pengeluaran perkapita, Inflasi juga jadi salah satu variabel makroekonomi yang mempengaruhi perekonomian masyarakat. Menurut BPS

Kabupaten Wonosobo (2019) Inflasi mengalami tren kenaikan dari tahun 2015 sebesar 2.71 persen menjadi 3.52 persen pada tahun 2018. Inflasi terlalu tinggi serta tidak diiringi pemerataan ekonomi akan memperlebar kemiskinan, timbul pengangguran, penurunan kesejahteraan dan meningkatkan ketimpangan pendapatan (Kusuma, 2019:284).

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Studi ini adalah penelitian deskriptif analisis memakai metode kuantitatif. Data dalam studi ini yaitu data sekunder berupa data *time series* tahun 2003-2019 di Kabupaten Wonosobo. Data yang digunakan adalah data persentase penduduk miskin bersumber dari BPS Jawa Tengah. Data angka melek huruf, pengeluaran perkapita dan inflasi bersumber dari BPS Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini diolah dengan menggunakan alat analisis *e-views 10*.

Teknik Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

Metode yang digunakan peneliti adalah *ordinary least square* dimana data harus melengkapi syarat asumsi klasik supaya nilai penaksir yang diperoleh tidak bias (*Best Linear Unbiased Estimator* = BLUE) dan efisien dari suatu persamaan regresi. Menurut Gujarati (2015:929), agar estimator bersifat BLUE maka perlu dilakukan uji asumsi klasik diantaranya uji normalitas,

multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

2. Analisa Regresi Linier Berganda

Studi ini memakai teknik analisa data menggunakan analisa regresi linier berganda guna meneliti seberapa besar pengaruh ketiga faktor terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo selama tahun 2003-2019. Sehingga persamaan regresi linier berganda dalam studi ini yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Ket :

Y = Tingkat Kemiskinan

α = konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = koefisien variabel independen

X_1 = Pendidikan

X_2 = Pengeluaran Perkapita

X_3 = Inflasi

ε = Residual

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Uji Asumsi Klasik

1) Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas diperoleh angka VIF untuk pendidikan sebesar 4.869736, variabel pengeluaran perkapita sebesar 4.928117, dan variabel inflasi sebesar 1.185488. Dari angka VIF tiga variabel tersebut di bawah angka 10, maka bisa disebut bebas dari masalah multikolinieritas.

2) Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji, nilai probabilitas Chi-Squared yaitu 0.1039 lebih besar dari ($\alpha=0.05$) sehingga bisa disimpulkan bahwa data bebas dari heteroskedastisitas.

3) Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji, nilai probabilitas Chi-Squared yaitu 0.0654 lebih besar dari ($\alpha=0.05$) sehingga bisa disimpulkan bahwa data bebas dari autokorelasi.

4) Uji Normalitas

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai probabilitas Jarque-Berra sebesar 1.094678 dengan probabilitas yaitu 0.578487 lebih besar ($\alpha=0.05$) sehingga disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Analisa regresi linear berganda

Tabel 2. Hasil Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Prob.
X ₁	-0.947383	-2.401881	0.032
X ₂	-0.003029	-1.340153	0.203
X ₃	0.043057	0.155500	0.878
C	139.7969	6.738183	0.000

Sumber : Olahan data E-Views10

Uji Statistik

1. Koefisien Determinasi

Perhitungan regresi memperoleh angka adjusted R² = 0.797823, yang disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan dapat dijabarkan oleh variasi independen pendidikan, pengeluaran perkapita dan inflasi sebesar 79.7823% dan 20.2177% dijabarkan oleh variabel lain diluar persamaan.

2. Uji F

Dari hasil regresi diperoleh Fhitung yaitu 22.04625, menggunakan (df)=k-1=4-1=3, n- 1=17-1=16 dan ($\alpha=0.05$), sehingga

Ftabel sebesar 3.24. Berdasarkan hasil regresi dihasilkan nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel yaitu 22.04625 > 3.24 yang bisa disebutkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Dengan hasil tersebut bisa disimpulkan bahwa pendidikan, pengeluaran perkapita dan inflasi secara serempak punya pengaruh terhadap persentase kemiskinan di Kabupaten Wonosobo dari 2003-2019.

Pembahasan

Pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2003-2019

Dari hasil analisa data, bisa diketahui bahwa pendidikan (X₁) berpengaruh dan punya hubungan negatif terhadap persentase kemiskinan di Kabupaten Wonosobo dari 2003-2019. Hal tersebut dibuktikan dalam koefisien = -0.947383 dan probabilitas = 0.0320, artinya jika nilai variabel pendidikan bertambah sebesar 1% maka akan terjadi penurunan persentase kemiskinan menjadi - 0.95%, dengan anggapan variabel yang lain tetap.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gamal Abdul Aziz, Eny Rochaida, dan Warsilan (2016), hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pendidikan punya efek negatif terhadap kemiskinan di Kabupaten Kutai, hal ini dikarenakan akses masyarakat Kutainegara menuju fasilitas pendidikan jauh terutama di daerah-daerah pedalaman yang masih terasing. studi ini juga sama dengan studi yang dilaksanakan Surya Bahadur Thapa

(2013), menyebutkan kalau pendidikan yang dilihat dari tingkat melek huruf memiliki efek negatif terhadap kemiskinan di Asia Selatan.

Berdasarkan penelitian ini, pendidikan mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo artinya bahwa pendidikan berpengaruh dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo tahun 2003-2019. Penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari anggaran APBD kabupaten yang dialokasikan pemerintah, dimana salah satu usaha menjamin dana pendidikan yang mencukupi di Indonesia diatur Pasal 49 (1) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa dana pendidikan di luar gaji guru dan biaya pendidikan kedinasan diperuntukan minimal 20 persen dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Pemda Kabupaten Wonosobo melalui Perda No 13 tahun 2016 menyebutkan bahwa Anggaran Belanja untuk pendidikan sebesar 440 Milyar setara 24% dari APBD. Namun, dalam Perda tersebut, ternyata Anggaran Belanja untuk pendidikan termasuk dengan gaji pegawai dengan jumlah yang dominan, dimana seharusnya gaji pegawai tersebut tidak masuk anggaran ASN. Laporan Bank Dunia (2009) dalam penelitian Sunandar & Nurkholis (2011) menemukan bahwa penelitian yang dilakukan di sepuluh

kabupaten/kota pada tahun 2006 menyebutkan bahwa apabila gaji guru dan tenaga kependidikan diinputkan ke dalam anggaran rata-rata dana pendidikan adalah 29%-40%. Namun jika komponen gaji dihapus dari anggaran dana pendidikan maka biaya pendidikan baru di angka 2-8%. Selain itu, wajib belajar 9 tahun sudah diatur dalam PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar, namun kesadaran masyarakat Kabupaten Wonosobo tentang pendidikan masih rendah, padahal sudah dinyatakan dalam pasal 9 ayat (3) bahwa masyarakat diatas lima belas tahun yang belum tuntas pendidikan dasar bisa menuntaskan pendidikannya sampai tuntas dengan biaya dari pemerintah.

Pengaruh Pengeluaran Perkapita terhadap persentase Kemiskinan di Kabupaten Wonosobo dari 2003-2019

Dari hasil analisa data dan uji t menunjukkan bahwa variabel pengeluaran perkapita (X_2) dari 2003-2019 punya pengaruh negatif terhadap persentase kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. Hal tersebut dibuktikan dalam koefisien -0.003029 dan probabilitas 0.2031 lebih tinggi dari ($\alpha=0.05$). Sehingga bisa disebut bahwa pengeluaran perkapita punya pengaruh tidak signifikan terhadap persentase kemiskinan di Kabupaten Wonosobo tahun 2003-2019.

Hasil studi ini, sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan Alamsyah (2019) menyatakan bahwa pengeluaran

konsumsi mengurangi tingkat kemiskinan. Dalam penelitian ini pengeluaran konsumsi memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan masyarakat migran di Kota Makassar selaras dengan penelitian terdahulu dari A. Mahendra (2016) bahwa pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendapatan perkapita yang menurut teori keynes berbanding lurus dengan pengeluaran konsumsi masyarakat punya pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumut.

Pengeluaran perkapita punya pengaruh tidak signifikan terhadap persentase kemiskinan di Kabupaten Wonosobo artinya bahwa peningkatan pengeluaran perkapita di Kabupaten Wonosobo yang terjadi pada tahun 2003-2019 tidak dipengaruhi oleh pengeluaran perkapita karena berdasarkan data BPS tahun 2019 rata-rata pengeluaran untuk makanan dari tahun 2011-2019 sebesar 50.24 persen lebih tinggi daripada rata-rata pengeluaran nonmakanan yang bernilai 49.76 persen. Hal ini memperlihatkan bahwa pengeluaran masyarakat Kabupaten Wonosobo masih berfokus untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu makanan.

Tabel 3. Rata-Rata Persentase Pengeluaran Perkapita Sebulan Berdasar Komoditi Pengeluaran di Kabupaten Wonosobo tahun 2011-2019

Jenis Pengeluaran	Rata-Rata
Makanan	50.24%
Non Makanan	49.76%

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo 2019

Pengaruh Inflasi terhadap persentase Kemiskinan di Kabupaten Wonosobo dari 2003-2019

Dari hasil analisa data dan uji t menunjukkan bahwa variabel inflasi (X3) dari 2003-2019 punya pengaruh positif terhadap persentase kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. Hal tersebut dibuktikan dalam koefisien 0.043057 dan probabilitas 0.8788 lebih tinggi dari ($\alpha=0.05$). Sehingga bisa disebut bahwa inflasi punya pengaruh tidak signifikan terhadap persentase kemiskinan di Kabupaten Wonosobo tahun 2003-2019.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanto *et all* (2017) menunjukkan bahwa inflasi meningkatkan tingkat kemiskinan. Dalam penelitian ini inflasi punya dampak positif tidak signifikan terhadap persentase kemiskinan di Kota Samarinda selaras dengan penelitian terdahulu dari Fitri Wahyu Yuliasih (2019) bahwa pada penelitian tersebut inflasi juga punya efek positif tidak signifikan di Provinsi Kalimantan Barat.

Inflasi punya pengaruh tidak signifikan terhadap persentase kemiskinan di Kabupaten Wonosobo artinya bahwa peningkatan inflasi di Kabupaten Wonosobo yang terjadi pada tahun 2003- 2019 tidak dipengaruhi oleh inflasi. Hal tersebut terjadi karena inflasi tidak begitu mempengaruhi masyarakat Kabupaten Wonosobo yang rata-rata bertempat tinggal di pedesaan, inflasi biasanya mempengaruhi harga pangan,

papan dan sandang. Bagi masyarakat desa, inflasi tidak terlalu punya pengaruh kepada masyarakat desa, apabila terjadi inflasi masyarakat desa bisa hidup mandiri dan menggunakan apa yang ada disekitar mereka seperti misalnya pangan, mereka bisa menanam sendiri tanpa harus membeli. Inflasi Kabupaten Wonosobo dari tahun 2015-2019 yang cenderung stabil dari pada tahun sebelum-sebelumnya yang bergerak fluktuatif. Berdasarkan data inflasi tahun 2019 mencapai 2.9%. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No 124 pasal 2 ayat (3) tentang Penetapan Sasaran Inflasi tahun 2019-2021 menyatakan bahwa target inflasi khususnya pada tahun 2019 adalah sebesar 3.5%.

Pengaruh Pendidikan, Pengeluaran Perkapita dan Inflasi Terhadap Persentase Kemiskinan di Wilayah Kabupaten Wonosobo dari 2003-2019

Dari hasil Uji F yang telah dilaksanakan terkait dengan pengaruh pendidikan, pengeluaran perkapita dan inflasi di Kabupaten Wonosobo tahun 2003-2019 memperlihatkan Fhitung lebih tinggi dari Ftabel yaitu $22.04625 > 3.24$ dengan probabilitas lebih kecil $0.000022 < 0.05$, yang punya arti kalau pendidikan, pengeluaran perkapita dan inflasi secara serempak punya pengaruh yang signifikan terhadap persentase kemiskinan di Kabupaten Wonosobo dari 2003-2019.

Koefisien Determinasi R^2 variabel independen secara bersama-sama

mempunyai kontribusi terhadap variabel dependen (Tingkat Kemiskinan) dilihat dari *adjusted R-squared* (R^2) 0.797823 / 79.78%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 79.78% sedangkan 21.22% dijabarkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan di penelitian ini.

Peningkatan pendidikan punya peran penting dalam menekan kemiskinan. Hal ini terjadi karena seseorang yang punya pendidikan tinggi, akhirnya punya pengetahuan dan skill sehingga akan menambah produktifitas seseorang dan memperoleh kesejahteraan yang lebih layak, yang diperlihatkan dari bertambahnya pendapatan atau pengeluaran perkapita. Pengeluaran perkapita merupakan refleksi daya beli masyarakat dan tingkat kesejahteraan bisa disebut meningkat apabila terjadi penambahan konsumsi riil perkapita, yaitu penambahan angka pengeluaran rumah tangga lebih tinggi dari inflasi pada waktu bersamaan. Sebaliknya apabila pendidikan rendah dan inflasi tinggi akan mengakibatkan penurunan produktifitas sehingga pendapatan masyarakat menurun dan daya beli juga ikut menurun yang akhirnya akan mengakibatkan naiknya tingkat kemiskinan.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Aziz *et all* (2016) yang menyatakan bahwa pendidikan, konsumsi dan pendapatan punya pengaruh secara

serentak terhadap kemiskinan di Kabupaten Kutai dan sejalan dengan penelitian Susanto *et all* (2017) menunjukkan bahwa inflasi, pendidikan dan pengangguran berpengaruh secara serempak terhadap kemiskinan di Kota Samarinda.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian dan pembahasan tersebut maka dapat diperoleh kesimpulan antara lain:

1. Pendidikan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo tahun 2003-2019. Pendidikan yang meningkat akan menyebabkan menurunnya persentase penduduk miskin di wilayah Kabupaten Wonosobo.
2. Pengeluaran perkapita mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap persentase kemiskinan di wilayah Kabupaten Wonosobo tahun 2003-2019. Pengeluaran perkapita memiliki pengaruh negatif akan tetapi tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap persentase kemiskinan di Kabupaten Wonosobo dari 2003-2019.
3. Inflasi punya pengaruh tidak signifikan terhadap persentase kemiskinan di Kabupaten Wonosobo tahun 2003-2019. Inflasi memiliki pengaruh negatif akan tetapi tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap persentase kemiskinan di Kabupaten Wonosobo dari

2003 hingga 2019.

4. Pendidikan, pengeluaran perkapita dan inflasi secara serentak punya pengaruh terhadap persentase kemiskinan di Kabupaten Wonosobo tahun 2003-2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz G., A., Rochaida E., Warsilan. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen*. Vol 12 No 1 Page: 29-48.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2019*. BPS: Jakarta.
2019. *Kabupaten Wonosobo Dalam Angka 2019*. BPS : Wonosobo.
2018. *Profil Ketenagakerjaan Kabupaten Wonosobo Hasil SAKERNAS Agustus 2018*. BPS : Wonosobo.
2019. *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2019*. BPS : Jawa Tengah.
- Depdikbud. 2003. Undang-Undang RI Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Gujarati, Damodar N. dan Dawn C. Porter. 2015. *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi 5 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hardinandar F. 2019. Determinan Kemiskinan (Studi Kasus 29 Kota/Kabupaten Di Provinsi Papua). *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*. Vol 4 No 1 Page : 1-12.
- Kusuma, D., S.,D., Sarfiah, S., N., Septiani, Y. 2019. Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Daerah

- Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2017. *Dinamic : Directory Journal Of Economic*. Vol 1 No 3 Page : 282-293.
- Mahendra A. 2016. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Inflasi Dan Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Sumatera Utara. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan)*. Vol 2 No 2 Page : 123-148.
- Menkeu. 2017. Peraturan Menteri Keuangan No 124 Tahun 2017 tentang Penetapan Sasaran Inflasi tahun 2019-2021.
- Pemda Kabupaten Wonosobo. 2016. Peraturan Daerah. Nomor 13 Tahun 2016 tentang APBD 2017. Permen. 2008. PP RI Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar.
- Putri, I. C., Juliprijanto W., Septiani Y. 2019. Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Dan PDRB Terhadap Kemiskinan Di Karesidenan Kedu Tahun 2014-2017. *Dinamic : Directory Journal Of Economic*. Vol 1 No 3 Page : 325-337.
- Rahman A. & Alamsyah M., F. 2019. Pengaruh Pendidikan, Pendapatan, dan Konsumsi Terhadap Kemiskinan Masyarakat Migran Di Kota Makassar. *Jurnal Ecces Economics, Social, and Development Studies*. Vol 6 No 1 Page : 111-129.
- Sunandar dan Nurkholis. 2012. Efisienkah Belanja Pendidikan di Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Pendidikan*. Vol 1 No 1 Page : 95-102.
- Sholihah, S., Laut L., T., Jalunggono G. 2019. Analisis Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Investasi, Tenaga Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2001-2010. *Dinamic : Directory Journal Of Economic*. Vol 1 No 2 Page : 159-167.
- Susanto E., Rochaida E., Ulfa Y. 2017. Pengaruh inflasi dan pendidikan terhadap pengangguran dan kemiskinan. *Jurnal INOVASI*. Vol 13 No 1, Page : 19-27.
- Thapa, Surya Bahadur. 2013. Relationship Between Education And Poverty In Nepal. *Economic Journal of Development Issues*. Vol 15 & 16 No 1-2 Page 148-161.
- Yuliasih, F., W. 2019. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Pendidikan Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Daerah*. Vol 7 No 1 Page : 1-22.